

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Krisis ekonomi, politik dan krisis kepercayaan yang berkepanjangan, yang melanda bangsa Indonesia, telah membawa dampak yang hampir keseluruhan aspek tatanan kehidupan. Meski membawa keterpurukan bagi bangsa dan rakyat Indonesia, akan tetapi ada hikmah positif adalah timbulnya ide dan pemikiran dasar yang memunculkan adanya suatu perubahan (reformasi) di dalam aspek kehidupan bernegara dan berbangsa. Sasaran utama adanya perubahan ini adalah untuk mewujudkan masyarakat madani (*civil society*) dalam kehidupan pemerintahan bermasyarakat dan bernegara yang memiliki nilai-nilai "*a Good Governance*" yang menumbuhkan nilai demokrasi dan sikap keterbukaan, kejujuran keadilan, yang berorientasi pada kepentingan rakyat, serta bertanggung jawab pada rakyat.

Dampak positif dari reformasi ini, di tinjau dari segi politik dan ketatanegaraan telah terjadi pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralistik mengarah pada sistem pemerintahan yang desentralistik dalam memberikan keleluasaan pada daerah dalam wujud otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab, untuk mengelola dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri yang

Dampak positif ini lah yang melahirkan UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah kemudian kedua UU ini di sempurnakan lagi menjadi UU republik indonesia No 32 tahun 2004 tentang pemeritahan daerah yang akan menjabarkan tentang pembentukan daerah dan kawasan khusus, juga penyelenggaraan pemerintahan daerah dan juga UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan daerah.lahirnya UU ini di pandang penting,karena melalui pelaksanaan UU ini di harapkan akan membawa dampak perubahan kepada kehidupan pemerintahan daerah yang dapat mewujudkan "*Good Governance*" dalam upaya mendekatkan rakyat dengan pemerintahan secara keseluruhan.

Otonomi daerah yang di dasari atas kesadaran bahwa peluang bagi daerah untuk membuktikan kemandiriannya, sekaligus merupakan tantangan yang tidak muda bagi suatu daerah sendiri. Otonomi daerah harus diarahkan pada keberhasilanya dengan dukungan pendanaan yang memadai bagi perimbangan antara pusat dan daerah, oleh karenanya kebijakan daerah tidak dapat di pungkiri lagi harus menitik beratkan pada peningkatan kualitas pelayanan masyarakat melalui pengelolaan keuangan daerah, dan bertujuan untuk meningkatkan peransertanya pada pembangunan. juga di tujukan pada mutu pelayanan pada masyarakat.

Sementara itu sebagai konsekuensi atas pelaksanaan UU itu,tentang

daerah harus siap dan bertanggung jawab dalam memberdayakan segala sesuatu yang ada di daerah tersebut, baik itu pemberdayaan masyarakat, lembaga politik maupun lembaga ekonomi. Akan tetapi di satu sisi pemerintah daerah belum siap menangani berbagai implikasi pembiayaan kegiatan pemerintah setelah otonomi daerah, baik dalam kegiatan rutin maupun pembangunan, oleh karena itu dalam rangka desentralisasi kepada setiap daerah diuntut untuk dapat membiayai diri melalui sumber-sumber keuangan yang di kuasanya. Peran pemda dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. Dengan ber titik tolak dari uraian di atas maka penulis mencoba menyusun skripsi dengan judul **“Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Menghadapi Pelaksanaan Otonomi Daerah “(studi kasus di kota industri Gresik Jatim)**

## **B. Batasan Masalah**

Dari latar belakang di atas dapat di simpulkan bahwa ciri utama suatu daerah otonom adalah terletak pada suatu kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan keuangan daerahnya dengan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat semakin kecil, oleh karena itu pendapatan asli daerah harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi

pelaksanaan otonomi daerah akan berpengaruh pada tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah, dan dalam pengukuran kinerja keuangan hanya berfokus pada varian finansial saja yaitu : a)varian pendapatan, b) varian pengeluaran yang terdiri dari varian belanja rutin dan belanja investasi/modal.dalam penelitian ini penulis hanya menganalisis ruanglingkup kinerja keuangan daerah kabupaten Gresik sebagai kota industri dalam menghadapi pelaksanaan otonomi daerah.

#### **C. Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah : sejauh mana kinerja keuangan pmerintahan daerah kabupaten Gresik sebelum menghadapi pelaksanaan otonomi daearh dan sesudah mennghadapi pelaksanaan otonomi daerah ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah mengukur dan menganalisis kinerja keuangan daerah kabupaten Gresik sebelum menjalankan kebijakan otonomi daerah dan sesudah menjalankan kebijakan otonomi daerah yang meliputi:

1. Peranan pendapatan asli daerah dalam penerimaan daerah.
2. Peranan hasil pajak dan non pajak terhadp penerimaan daerah.

**E. Manfaat**

1. Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberi masukan bagi pemerintah kabupaten Gresik dan daerah sekitarnya untuk menyusun berbagai program guna meningkatkan upaya penggalian sumber-sumber penerimaan daerah.
2. Sebagai bahan masukan untuk penelitian yang lebih lanjut, khususnya pemerhati masalah-masalah yang berkaitan dengan otonomi daerah.
3. Dengan penelitian ini penulis akan mendapat gambaran secara langsung dari teori yang di peroleh baik dari bahan-bahan kulia maupun literatur